



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 155, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 81 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 81) ;
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Mokh. Sodik Triwidiyanto
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 183

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 183 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

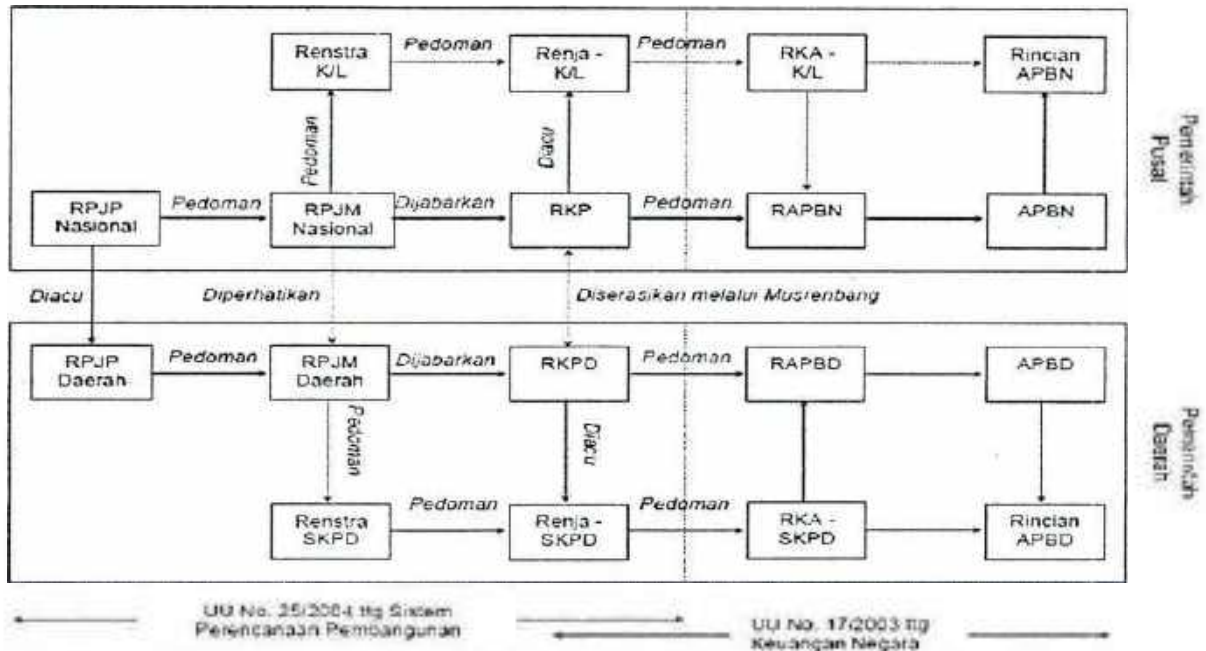
Rencana Kerja PD (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi untuk Periode Tahun 2022, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen perencanaan instansi pemerintah yang secara hierarki merupakan penjabaran operasional dari perencanaan instansi atau lembaga di atasnya, Materi yang ada di dalamnya didasarkan pada RKPD, Renstra OPD, Renja K/L serta Renja Kabupaten, sehingga diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terintegrasi dan sinergis dengan tujuan dan sasaran pembangunan secara makro

Renja ini memuat beberapa hal, antara lain:

1. Evaluasi capaian kinerja tahun 2021
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi masa mendatang.
3. Sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 pada tahapan RPJMD ke-4 (tiga) yaitu Pengembangan Teknologi Guna Mewujudkan Kabupaten Ngawi yang Sejahtera.



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023

Gambar 1.1. Alur penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi tahun 2023

Dokumen renja ini digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi tahun 2023 dan digunakan juga sebagai acuan dalam pemanfaatan APBD dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah serta visi dan misi Kepala Daerah melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen RKA ini memuat anggaran pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan target indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan. dengan tersusunnya dokumen RKA yang tepat diharapkan target pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan serta visi dan misi Kepala Daerah pada tahun yang bersangkutan dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang akan dijalankan serta penganggarannya pada Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mendiskripsikan program-program yang akan dilaksanakan yang menitik beratkan pada program-program prioritas;
2. Memberikan arah pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah;
3. Sinkronisasi dan sibegritas program kegiatan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKPD;
4. Membuat Acuan, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi;
5. Bahan evaluasi perencanaan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landaaaan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematikka Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu da Capaian Renstra PD

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam hal penilaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Periode Tahun 2021, dapat melalui pendekatan penilaian tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 yaitu yang kami ambil dengan membandingkan target dengan realisasinya. Selain itu perlu juga diukur tingkat pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dengan mengukur tingkat capaian program dan kegiatan tahun 2020. Deskripsi tingkat capaian Recan Kerja dan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan 2020 yang disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel : 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
 Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (n-1/tahun berjalan)
 Kabupaten Ngawi

Nama PD : Perikanan dan
 Peternakan

Lembar : 1

Kode	Nama/Bidang/urutan Pemerintah Daerah dari Program / Kegiatan	Indikator Utama Program/Kegiatan atau Kegiatan	Target Anggaran Program/Kegiatan (Rp. Utama dan Subsidi)	Pembahasan Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan yang menjadi target Renstra (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Kabupaten Ngawi Tahun 2022			Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja Pemerintah Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Berdasarkan Daerah (Rp. 2022)	Kualitas Kerja Berdasarkan Daerah (tahun 2022) (1-5)	Target Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun berjalan (Tahun n-1/2022)
			0	0			100/100	0	10-100/100
2.03.25	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		6.051.179.598	6.051.179.598	6.051.179.598	5.752.633.391	92,88 %	-	-
2.03 2.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	570.775.800	570.775.800	570.775.800	550.814.619	98,25 %	-	-
2.03 2.03.01 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon yang dibayar,	128.633.000	128.633.000	128.633.000	111.083.051	86,36 %	-	-

		Jumlah rekening listrik yang dibayar,								
		Jumlah rekening internet yang dibayar								
		jumlah rekening air yang dibayar								
2.03 2.03.01 01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar KIRnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.999.000	99,99 %	-	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya								
2.03 2.03.01 01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor	197.990.000	197.990.000	197.990.000	197.990.000	100%	-	-	-
2.03 2.03.01 01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase pemenuhan Alat Tulis Kantor	65.000.000	65.000.000	65.000.000	63.502.340	98,85 %	-	-	-
2.03 2.03.01 01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang digandakan,	19.294.00	19.294.00	19.294.00	19.163.600	99,66 %	-	-	-
		jumlah barang yang dicetak								
2.03 2.03.01 01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	8.015.000	8.015.000	8.015.000	7.962.800	99,67 %	-	-	-
2.03 2.03.01 01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.046.000	99,98 %	-	-	-
2.03 2.03.01	Penyediaan Makanan	Jumlah makanan	24.854.00	24.854.000	24.854.000	24.467.000	99,22	-	-	-

01.10	dan Minuman	dan minuman yang disediakan	0				%			
2.03 2.03.01 01.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/dikuti	71.721.000	71.721.000	71.721.000	71.685.128	99,97 %	-	-	-
2.03 2.03.01 01.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri/dikuti	37.218.000	37.218.000	37.218.000	36.915.700	99,59 %	-	-	-
2.03 2.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	184.595.000	184.595.000	184.595.000	179.890.000	98,71 %	-	-	-
2.03 2.03.01 02.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli/diadakan	27.000.000	27.000.000	27.000.000	24.530.000	95,43 %	-	-	-
2.03 2.03.01 02.04	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang dibeli/adakan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.755.000	96,89 %	-	-	-
2.03 2.03.01 02.06	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	17.930.000	99,8%	-	-	-
2.03 2.03.01 02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	34.000.000	34.000.000	34.000.000	33.997.000	100%	-	-	-
2.03 2.03.01 02.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	43.095.000	43.095.000	43.095.000	43.055.000	99,96 %	-	-	-
2.03 2.03.01 02.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.785.000	85,7%	-	-	-

2.03 2.03.01 02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Jumlah pemeliharaan taman	10.000.00 0	10.000.000	10.000.000	9.940.000	99,7%	-	-	-
2.03 2.03.01 02.16	Pemeliharaan Peralatan Kerja	jumlah pemeliharaan peralatan kerja	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.899.000	98,99	-	-	-
2.03 2.03.01 02.17	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli,	25.000.00 0	25.000.000	25.000.000	24.999.000	100%	-	-	-
		jumlah bahan kebersihan yang dibeli,								
		jumlah pembayaran jasa kebersihan								
2.03 2.03.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Aparatur yang disiplin	17.400.00 0	17.400.000	17.400.000	14.660.000	91,98 %	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang di sediakan	17.400.00 0	17.400.000	17.400.000	14.660.000	92,13 %	-	-	-
2.03 2.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD	70.772.00 0	70.772.000	70.772.000	68.662.500	98,47 %	-	-	-
2.03 2.03.01 06.01	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu	55.830.00 0	55.830.000	55.830.000	53.752.500	98,14 %	-	-	-
		Jumlah Laporan kinerja OPD yang disusun Tepat waktu								

2.03 2.03.01 06.06	Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	Jumlah laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	14.942.000	14.942.000	14.942.000	14.910.000	99,89 %	-	-	-
2.01 2.03.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	1.334.239.700	1.334.239.700	1.334.239.700	1.297.368.910	98,62 %	-	-	-
2.01 2.03.01.15.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah benih ikan unggul yang diproduksi BEI dan UPR	204.496.700	204.496.700	204.496.700	199.129.035	98,69 %	-	-	-
		Jumlah sarana prasarana pembenihan ikan yang memenuhi standar								
2.01 2.03.01.15.02	Pengembangan Perikanan budidaya dan Perikanan tangkap	Jumlah Pembudidaya ikan dan nelayan tangkap yang nilainya naik	874.743.000	874.743.000	874.743.000	849.093.275	98,54 %	-	-	-
		Jumlah laporan hasil gemarikan yang ditindaklanjuti								
2.01 2.03.01.15.03	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang melaksanakan CPB, CPIB, CPPB	255.000.000	255.000.000	255.000.000	249.146.600	98,85 %	-	-	-
		jumlah hasil uji sampel yang di tindaklanjuti								
2.01 2.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT SUB BIDANG PERIKANAN	Prosentase pokdakan yang akti	265.100.000	265.100.000	265.100.000	261.875.100	74,39 %	-	-	-

2.01 2.03.01.16.01	Bantuan Sarana Produksi Perikanan Bagi Masyarakat/Kelompo k Masyarakat	Jumlah pokdakan yang difasilitasi sarpras produksi perikanan	-	-	-	-	-	-	-
2.01 2.03.01.16.02	Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembinaan dan Pelatihan Perikanan	Jumlah peserta pelatihan yang mendapat nilai 75	-	-	-	-	-	-	-
2.01 2.03.01 16.003	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah Pokdakan yang difasilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan	265.100.0 00	265.100.000	265.100.600	261.875.100	99,39 %	-	-
2.01 2.03.01.17	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN SUB BIDANG PERIKANAN		42.751.00 0	42.751.000	42.751.000	42.677.000	99,98 %	-	-
3.01 2.03.01.17.01	Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembinaan/Pelatihan Pembudidayaan ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang Mengikuti Pelatihan	42.751.00 0	42.751.000	42.751.000	42.677.000	99,92 %	-	-

2.3.24.2.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1.376.27 5600	1.376.275 600	1.376.275 600	1.376.275 600				
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		510.000. 100	510.000.10 0	510.000.10 0	510.000.10 0				
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tan aman Skala Kecil		840.475. 500	840.475.50 0	840.475.50 0	840.475.50 0				
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		25.800.0 00	25.800.000	25.800.000	25.800.000				
2.3.24.2.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		64.500.0 00	64.500.00 0	64.500.00 0	64.500.00 0				
2.3.24.2.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		64.500.0 00	64.500.000	64.500.000	64.500.000				

3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun								
3.25.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu						76.000.000,0 0		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu						5.039.843,47 0,23		
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan						10.000.000,0 0		
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun						70.000.000,0 0		

3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun						269.832.400,00		
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun						216.299.600,00		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun						346.902.043,00		
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik drh penunjang urusan pem. drh yang terpelai dalam setahun						179.890.000,00		

3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap							
3.25.03.2.01	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan produksi perikanan tangkap yang ditindaklanjuti						162.000.000,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pembinaan kelembagaan, diversifikasi produk perikanan dan sosialisasi terkait pemberdayaan nelayan						40.000.000,00	
		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kecil yang naik kapasitasnya							

3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya						1.257.000.00 0,00		
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						20.000.000,0 0		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peserta yang menindak.i hasil pelat. budidaya ikan, pakan mandiri, kelemb. dan fasilitasi kemitraan usaha						130.000.000, 00		
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan TDPIK						25.000.000,0 0		

3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase laporan prod. perikanan budidaya yg di tindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan yang dimanfaatkan Persentase pembudidaya yang mendapatkan rekomendasi sertifikasi CBIB, CPIB, CPPIB						1.082.000.00 0,00		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kawasan Perairan Umum Darat (PUD) yang diawasi						20.000.000,0 0		
3.25.05.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Persentase PUD dan Pembudidaya ikan yang diawasi						20.000.000,0 0		

3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						290.000.000,00		
3.25.06.2.0 1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil	Persentase hasil Pengolahan dan pemasaran Perikanan						10.000.000,00		
3.25.06.2.0 1.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pendataan terkait Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan yang disusun						10.000.000,00		
3.25.06.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan sosialisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil						15.000.000,00		

3.25.06.2.0 2.01	Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	Jumlah peserta sosialisasi penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil						15.000.000,0 0		
3.25.06.2.0 3	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan						265.000.000,00		
		Persentase bantuan sarana prasarana pengolahan yang dimanfaatkan								
3.25.06.2.0 3.01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi gemarikan						95.000.000,0 0		
		Jumlah Kegiatan pameran hasil olahan perikanan yang diikuti								

3.25.06.2.0 3.02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasaran yang di fasilitasi bantuan sarana produksi pengolahan hasil perikanan						170.000.000,00		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas peternakan						2.592.140.000,00		
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular								
3.27.02.2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase bibit ternak yang dihasilkan						400.000.000,00		
3.27.02.2.01. 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komod. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana produksi peternakan yang diadakan						400.000.000,00		

3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase komoditas peternakan unggulan daerah yang dioptimalkan budidayanya						1.295.000.00 0,00		
		Persentase pelaku usaha peternakan yang meningkat kemampuan agribisnisnya								
		Persentase bibit ternak yang dihasilkan								
3.27.02.2.02. 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pembinaan budidaya ternak yang diadakan						635.000.000, 00		
		Jumlah Sampel pakan ternak yang diperiksa								
3.27.02.2.02. 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah sarana produksi peternakan yang diadakan						660.000.000, 00		

3.27.02.2.0 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelahiran ternak melalui inseminasi buatan						595.140.000,00		
3.27.02.2.03. 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pembinaan mutu ternak dan pakan yang dilaksanakan						565.140.000,00		
3.27.02.2.03. 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pembinaan dan monitoring peredaran pakan yang dilakukan						30.000.000,00		
3.27.02.2.0 4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengecer obat hewan yang dilakukan pembinaan						302.000.000,00		
3.27.02.2.04. 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah obat hewan yang diperiksa						302.000.000,00		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelayanan pemotongan hewan di RPH						250.000.000,00		

3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase RPH dan sarana pendukungnya dalam kondisi baik						180.000.000,00		
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dirhab						100.000.000,00		
		Jumlah sarana RPH yang diadakan								
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana pendukung puskesmas yang diadakan						80.000.000,00		
		Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan renovasi								
3.27.03.2.0 3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dipelihara						70.000.000,00		
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit yang difasilitasi						70.000.000,00		

		Jumlah prasarana yang diadakan							
		Jumlah dokumen kawasan peternakan yang disusun.							
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kematian ternak karena penyakit						2.052.800.000,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis						850.000.000,00	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengendalian penyakit hewan yang dilaksanakan						850.000.000,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit data penyakit hewan yang teridentifikasi						922.800.000,00	

3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel yang diperiksa					922.800.000,00		
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang dibangun/direhab/ dilakukan pemeliharaan							
		Jumlah sarana pendukung Laboratorium Kesehatan Hewan yang diadakan							
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan pembinaan					280.000.000,00		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan					280.000.000,00		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang meningkatkan Usaha Peternakannya					250.000.000,00		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang meningkatkan kapasitas kelembagaanya					250.000.000,00		

3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan/Desa	Jumlah Pembinaan Poktan yang dilaksanakan						250.000.000,00		
-----------------	---	---	--	--	--	--	--	----------------	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023, dapat diketahui sebagai berikut :

1. IKU Dinas Perikanan dan Peternakan yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
 - b. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
 - c. Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB
2. IKU Dinas Perikanan dan Peternakan yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Prosentase Peningkatan produksi perikanan
 - b. Prosentase Peningkatan produksi peternakan

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Perikanan dan Peternakan disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	-	80	80,50	81,00	81,50	8.493	NA	NA	NA	
2	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	-	-	160.221,77	166.630,64	173.295,87	180.227,7	175.495,88	NA	NA	NA	
3	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan	-	-	982.544,0	1.002.248,1	1.035.843,2	1.068.794,9	830.508,40	NA	NA	NA	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi ditunjukkan pada table 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Pemetaan permasalahan urusan perikanan dan peternakan
Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan dan Peternakan
 (Sesuai Urusan yang di bidangi oleh Perangkat Daerah)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap	Belum optimalnya produktifitas perikanan tangkap	Data dan Informasi Perikanan Tangkap mengalami perubahan
			Sarana prasarana perikanan tangkap yang kurang memadai
			Sumbert Daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) semakin berkurang
			Kurangnya kapasitas nelayan kecil
		Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelembagaan KUB nelayan kurang optimal
			Belum ada prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Produktifitas Perikanan Budidaya belum optimal	Belum ada pelayanan Tempat Pelelangan ikan
			Kurangnya kapasitas pembudidaya ikan kecil

			Kelembagaan pembudidaya ikan kurang optimal
			Akses permodalan belum optimal
			Kurangnya pengetahuan tentang peningkatan mutu produksi perikanan
			Data dan Informasi Perikanan Budidaya mengalami perubahan
			Sarana prasarana perikanan budidaya yang kurang memadai
			Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
		Kurangnya konsumsi ikan masyarakat	Pemahaman CBIB, CPIB, CPPIB belum optimal
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan
			Kurangnya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil
2	Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk peternakan	Usaha peternakan masih sampingan/tradisional	Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			Lemahnya permodalan peternak
			Tingginya resiko budidaya ternak
		Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan belum optimal	Pengawasan peredaran obat hewan belum optimal
			Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			belum optimalnya prasarana dan sarana laboratorium kesehatan hewan
			Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap

			pentingnya produk hewan yang ASUH
3	Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk peternakan	Usaha peternakan masih sampingan/tradisional	Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			Lemahnya permodalan peternak
			Tingginya resiko budidaya ternak
		Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan belum optimal	Pengawasan peredaran obat hewan belum optimal
			Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			belum optimalnya prasarana dan sarana laboratorium kesehatan hewan
			Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingya produk hewan yang ASUH
4	Belum optimalnya diseminasi teknologi budidaya pertanian	Belum optimalnya peran/fungsi kelembagaan pertanian	Prasarana dan sarana BPP yang kurang memadai
			Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM pertanian
		Belum optimalnya media penyuluhan pertanian	Media penyuluhan masih terbatas

Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi dinas Perikanan dan Peternakan juga dihadapkan pada tantangan dan peluang, Adapun peluang dan upaya Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas tinggi dalam pengembangan budidaya perikanan.
- 2) Peningkatan Pembinaan serta Pelatihan di bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
- 3) Pemberian Fasilitas tentang tata cara budidaya ikan yang baik
- 4) Pengelolaan epidemi penyakit menular ternak;
- 5) Angka S/C yang masih tinggi;
- 6) Gangguan reproduksi pada sapi betina produktif;
- 7) Pengeluaran ternak keluar daerah belum terdeteksi;
- 8) Kurangnya perhatian peternak terkait dengan manajemen pemeliharaan ternaknya karena masih tradisional dan merupakan usaha sampingan;
- 9) Perlunya pengolahan hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan peternakan.

2. Peluang

- 1) Dukungan Pemerintah Daerah dalam kebijakan dan implementasinya pada sub sektor perikanan dan peternakan semakin besar;
- 2) Teknologi dan inovasi dibidang perikanan dan peternakan yang semakin berkembang;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan semakin tinggi;
- 4) Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang konsumsi ikan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran peningkatangizimasyarakat.
- 5) Pemanfaatan lahan non pertanian untuk budidaya perikanan

- 6) Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan peternakan.
- 7) Optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan
- 8) Penanganan gangguan reproduksi
- 9) Pencegahan penyakit hewan menular strategis yang menyebabkan kematian ternak
- 10) Menjamin ketersediaan vaksin dan obat hewan yang memadai melalui pelayanan kesehatan hewan.
- 11) Melakukan pembinaan / menyampaikan informasi terkait agribisnis usaha peternakan dan pasca panen.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu penting dan catatan strategis yang direkomendasikan untuk dasar penyusunan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan (degradasi ekosistem, penurunan kualitas air, penyakit ikan dan lingkungan)
2. Peningkatan permintaan ikan
3. Pakan ikan (60-70% dari biaya produksi)
4. Adanya daya dukung (tersedia lahan budidaya dan perairan umum)
5. Genetik ikan (Penurunan kualitas benih dan induk ikan)
6. Keamanan pangan dan ketelusuran
7. Perubahan iklim
8. Alih fungsi lahan budidaya
9. Penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing
10. Illegal fishing (penangkapan ikan yang melanggar hukum)
11. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk konsumsi ikan
12. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia serta pemberdayaan kelembagaan petani
13. Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang budidaya perikanan
14. Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang budidaya peternakan
15. Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat
16. Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetic
17. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan

komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, RKP Tahun 2023, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan triwulan II tahun 2021, permasalahan pandemi COVID-19, banjir, rob, dan upaya pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Dokumen RKPD Tahun 2023 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 4) Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021-2026. Pada tahun pertama (tahun 2022) RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2023. Hasil riview ini selanjutnya dijadikan dasar analisis kebutuhan

dalam rangka pencapaian kinerja dari Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.

Mendasar pada renstra Dinas Perikanan dan Peternakan RKPD tahun 2023 terdapat perubahan yang sangat signifikan. Hasil kajian kebutuhan menunjukkan bahwa nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan saat ini mengacu pada permendagri nomor 90 tahun 2019. Namun demikian untuk indikator program kegiatan dan sub kegiatan tetap mengacu pada indikator yang sudah ada dengan target yang disesuaikan.

Selanjutnya analisis kebutuhan pada Renja Tahun 2023 pada kajian terhadap visi misi serta arah pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2023. Sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2023, prioritas pembangunan Daerah tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi daerah, oleh karena itu target kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Meningkatkan Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB Berdasarkan kondisi tersebut, analisis kebutuhan Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2023 diprioritaskan untuk :

1. Dilakukan Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pembudidaya;
2. Pemberian Pelatihan kepada kelompok pembudidaya CBIB,CPPIB;
3. Pemberian pendampingan pembinaan;
4. Pemberian pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan
5. Potensi limbah pertanian sebagai bahan baku pakan ternak yang cukup besar
6. Animo peternak terhadap komoditas ternak yang dikembangkan
7. Peluang pasar yang terbuka
8. Potensi limbah pertanian sebagai bahan baku pakan ternak yang cukup besar

Analisis kebutuhan untuk pencapaian kinerja tahun 2023 juga didasarkan pada perkiraan inflasi dan kondisi pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .Kebutuhan prioritas pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan

tersebut diatas ditunjukkan oleh table. 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

NAMA PD : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3														
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
3	25					8.477.767.51 3					7.755.578. 779			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3	25	0 1			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	6.208.767.84 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	5.985.702. 905		
3	25	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penanggung, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	98%	76.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	61.606.00 0	
3	25	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan PD yang disusun	0 dokumen 6 kumen	37.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	4 dokumen 11 dokumen	35.500.000

3	25	0 1	2,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000
3	25	0 1	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.907.500
3	25	0 1	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	4.070.000
3	25	0 1	2,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.675.000
3	25	0 1	2,0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah laporan Kinerja OPD yang disusun	11 laporan	19.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun	8 dokumen	11.453.500

3	25	0 1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari			5.041.921.16 8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.039.844. 336
3	25	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	25 Dokumen 1.128 Orang/bulan	5.019.844,668	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	26 Dokumen 1.128 Orang/bulan	5.019.844. 668
3	25	0 1	2,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.767.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000
3	25	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 laporan	11.309.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 laporan	10.000.000
3	25	0 1	2,0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari			9.950.000					
3	25	0 1	2,0 4	0 2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	9.950.000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		

3	25	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri			96.279.000						
3	25	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas-Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	1 Paket	17.875.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	-	-	
3	25	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah ASN yang mengikuti Didat	10 Pegawai	23.404.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah ASN yang mengikuti Didat	-	-	
3	25	0 1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	200 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	
3	25	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	3 Orang	45.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-undangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	-	-	
3	25	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				300.229.560	Administrasi Umum Perangkat Daerah					291.413.560
3	25	0 1	2.0 5	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 Paket	25.408.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 Paket	19.165.000	
3	25	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	67.541.560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	67.541.560	
3	25	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	7.885.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	7.885.000	

3	25	0 1	2,0 5	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	17.556.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	13.857.000
3	25	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Dolumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	200 dokumen	21.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Dolumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	200 dokumen	21.500.000
3	25	0 1	2,0 6	0 8	Facilitasi kunjungan tamu	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	11.500.000	Facilitasi kunjungan tamu	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	11.500.000
3	25	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lembar	148.739.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lembar	149.855.000
3	25	0 1	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				342.130.117	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				527.470.600
3	25	0 1	2,0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	51.961.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	51.961.000
3	25	0 1	2,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	44.867.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	44.867.000
3	25	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				342.130.117	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				346.902.043

3	25	0 1	2,0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	8.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	10.000.000
3	25	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemasangan daya listrik Jumlah Penambahan daya listrik	5 kali 183 Laporan 0 Titik 0 KWH	207.695.617	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pemasangan daya listrik Jumlah Penambahan daya listrik	5 Kali 0 Laporan 183 Laporan 0 Titik 0 KWH	204.902.043
3	25	0 1	2,0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000
3	25	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	110 Laporan	105.884.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	110 Laporan	100.000.000
3	25	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.430.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			333.380.117	
3	25	0 1	2,0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.000.000

										Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
3	25	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	48.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	48.600.000	
3	25	0 1	2,0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	48.080.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.280.000	
3	25	0 1	2,0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirch abilitas	4 Unit	80.750.000	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabi litas	4 Unit	80.750.000	
3	25	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				202.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				65.000.00 0	
3	25	0 3	2,0 1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				129.500.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Kawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.00 0	
3	25	0 3	2,0 1	0 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	29.500.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.000.000	

3	25	0 3	2,0 1	0 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	45.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	30.000.000	
3	25	0 3	2,0 1	0 2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	5 Unit	55.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	-	-	
3	25	0 3	2,0 2		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				72.500.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	
3	25	0 3	2,0 2	0 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	50.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil Yang Meningkatkan Pengembangan Kapasitasnya	40 Orang	25.000.000	
3	25	0 3	2,0 2	0 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya	5 Kelompok	22.500.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya	-	-	
3	25	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.706.999.668	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				953.699.668	
3	25	0 4	2,0 2		Pemberdayan Pembudi Daya Ikan Kecil				346.500.000	Pemberdayan Pembudidaya Ikan Kecil				721.699.668	
3	25	0 4	2,0 2	0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	270.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	222.000.000	
3	25	0 4	2,0 2	0 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Yang Mengikuti Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	76.500.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Yang Mengikuti Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	10.000.000	

3	25	0 4	2,0 4		Pengelolaan Pembudidaya Ikan				1.360.499.668	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			721.699.668	
3	25	0 4	2,0 4	0 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudiyaaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Data dan Informasi Pembudiyaaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudiyaaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Penyediaan Data dan Informasi Pembudiyaaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000
3	25	0 4	2,0 4	0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	615.499.668	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	191.499.668
3	25	0 4	2,0 4	0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	600.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	485.000.000
3	25	0 4	2,0 4	0 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Pengelolaan Kesehatan	1 Dokumen	65.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Pengelolaan Kesehatan	-	-
3	25	0 4	2,0 4	0 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Pembudidaya Yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	40 Orang	50.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Pembudidaya Yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	40 Orang	30.000.000

3	25	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				150.300.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARANHA SIL PERIKANAN					
3	25	0 6	2,0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.300.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
3	25	0 6	2,0 3	0 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Ton	82.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Ton		
3	25	0 6	2,0 3	0 2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	68.300.000	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha		

3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sunagi, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				20.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sunagi, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sunagi, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sunagi, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sunagi, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sunagi, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				340.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				10.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						

3	25	0 6	2,0 1	0 1	Penyediaan Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Penyediaan Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Penyediaan Data Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-
3	25	0 6	2,0 2		Pembinaan Mutu dan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				25.000.000	Pembinaan Mutu dan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
3	25	0 6	2,0 2	0 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	4 Unit Usaha	25.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	-	-
3	25	0 6	2,0 3		Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				305.000.000	Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
3	25	0 6	2,0 3	0 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Ton	195.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasari	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-

3	25	0 6	2.0 3	0 2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	110.000.000	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi	-	-
3	27	0 2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.057.140.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.057.140.000
3	27	0 2	2.0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				400.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				332.928.500
3	27	0 2	2.0 1	0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	10 Laporan	400.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	10 Laporan	332.928.500
3	27	0 2	2.0 2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				2.760.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				2.760.000.000
3	27	0 2	2.0 2	0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2.100.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1.747.470.000
3	27	0 2	2.0 2	0 2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	600.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	361.490.000

3	27	0 2	2.0 3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Serta Pakan Dalam Kabupaten/Kota				595.140.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Serta Pakan Dalam Kabupaten/Kota				381.982.000	
3	27	0 2	2.0 3	0 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Sakla Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlahh Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skla Kecil	20 Laporan	565.140.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skla Kecil	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlahh Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skla Kecil	20 Laporan	351.982.000	
3	27	0 2	2.0 3	0 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	4 Laporan	30.000.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	4 Laporan	30.000.000	
3	27	0 2	2.0 4		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				302.000.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				100.000.000	
3	27	0 2	2.0 4	0 1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1 Laporan	302.000.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1 Laporan	100.000.000	
3	27	0 3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				250.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.513.223.500	
3	27	0 3	2.0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian				180.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian				2.459.567.500	
3	27	0 3	2.0 2	0 7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan Di Pelihara	1 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan Di Pelihara	1 Unit	1.600.000.000	

3	27	0 3	2,0 2	0 0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya dibangun, direhabilitasi dan Di Pelihara	1 Unit	80.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya dibangun, direhabilitasi dan Di Pelihara	1 Unit	859.567.500
3	27	0 3	2,0 3		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				70.000.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			53.656.000	
3	27	0 3	2,0 3	0 1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	70.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	53.656.000
3	27	0 4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				2.052.800.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			930.000.000	
3	27	0 4	2,0 2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				850.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			850.000.000	
3	27	0 4	2,0 1	0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	19 Laporan	850.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	19 Laporan	500.000.000

3	27	0 4	2,0 3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota			922.800.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		
3	27	0 4	2,0 3	0 1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	845 Laporan	922.800.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	845 Laporan	150.000.000	
3	27	0 4	2,0 4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			280.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				280.000.000		
3	27	0 4	2,0 4	0 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	780 Laporan	280.000.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	780 Laporan	280.000.000	
3	27	0 7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			250.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				97.000.000		
3	27	0 7	2,0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			250.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				97.000.000		
3	27	0 7	2,0 1	0 1	Pengembangan Kapasitas Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	250.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Ngawi, Karangasri	Jumlah Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	97.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat merupakan wujud dari alur perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Proses inventarisasinya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten. Usulan yang disampaikan perlu dianalisis untuk disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Dari hasil inventarisasi, usulan kegiatan yang dapat dijadikan pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
1.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dusun Klumpit, Dusun Sumberejo, Dusun Brebes, Dusun Kersikan Desa Kersikan Kec. Geneng Kabv. Ngawi	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	20 Paket 100.000.000	
2.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dusun Wonorwojo, Desa Sidorejo Kec. Kendal Keb. Ngawi	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	12 Paket 60.000.000	
3.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dusun Weru/Samben Desa Sidokerto, Kec. Karangjati Kab. Ngawi	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	4 Paket 20.000.000	
4.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4 Dusun Desa Ngrayuda Kec. Jogorogo Kab. Ngawi	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	6 Paket 30.000.000	
5.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Kayutrejo Kec. Widodaren Kab. Ngawi	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	20 Paket 100.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
6.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dusun Blidar Desa Grendeng Kec. Sine Kab. Ngawi	Ristocking (Penebaran Benih di Perairan Umum)	1 paket 10.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
7.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dusun Desa Ngancar Kec. Pitu Kab. Ngawi	Paket Budidaya Pembenihan	6 paket 15.000.000	
8.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Brubuh Desa Brubuh Kec. Jogorog Kab. Ngawi	Paket Budidaya Pembenihan	60 paket 150.000.000	
9.	Penjaminan Keteresediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Sidorejo Kec. Geneng Kab. Ngawi	Paket Percontohan Budidaya Ikan	1 paket 55.000.000	
10.	Penjaminan Keteresediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Gajah Desa Ngancar Kec. Pitu	Paket Percontohan Budidaya Ikan	1 paket 55.000.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
11.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanman	Dusun Ngacar Desa Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi	Bantuan Pakan Ternak Kambing	20 paket 200.000.000	
12.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanman	Setiap Dusun Desa Puhti Kec. Karangjati	Bantuan Pakan Ternak Sapi	1.250 Ekor 200.000.000	

Ngawi,

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGAWI

BONADI, AKS, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710329 199403 1 008

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dan Kebijakan Propinsi Jawa Timur yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi adalah :

Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Timur yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.

No	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Ket
1	2	3	4
A	NASIONAL.		
	Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:		
1.	Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pembangunan perikanan, Ppengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;	Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	
2.	Mengoptimalkan dan memperkuat industri perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;		
3.	Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;		
4.	Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, karantina ika melalui koordinasi		

	dengan instansi terkait; dan		
5.	Penguatan SDM dan inovasi riset kelautandan perikanan.		
	Arah Kebijakan Kementerian Pertanian adalah :		
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja)keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global	Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	
2.	Pembangunan insfrakstrutur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;		
3.	Penyerderhanaan Regulasi yaitu menyederhanaan aegala bentuk regulasi dnegan pendekatan Omnibus Law, terutama menrbitkanUU Cipta Lapngan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;		
4.	Penyerderhanan Birokrasi yaitu memprioritaskan investasi untuk lapangan kerja, memangkas prosedu dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;		
B	Propinsi Jawa Timur		
	Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan :		
1.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur	Renstra	
2.	Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur;	Dinas Kelautan dan	
3.	Meningkatkan pendapatan		
4.	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikan	Perikanan Prov.Jatim	

5.	Meningkatkan pemanfaatan ruang laut melalui kemitraan strategis dalam pengembangan dan peyebarluasan teknologi hasil kelautan dan perikanan;	Tahun 2020-2024	
6.	Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu;		
7.	Meningkatkan pelayan pelaku usaha pembudidaya ikan di Jawa Timur;		
8.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;		
9.	Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan di Jawa Timur;		
10.	Mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan;		
11.	Meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan di Jawa Timur;		
12.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan.		
	Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah :		
	Pro Poor		
	Pendekatan Pro Poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.		
	Pro Job		
	Pendekatan <i>Pro Job</i> dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.		
	Pro growth		
	Pendekatan Pro growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan		

	perikanan, dan subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.		
	<i>Pro sustainability</i>		
	Pendekatan <i>Pro sustainability</i> dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sertamitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.		
	Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan :		
1.	Meningkatkan penerapan good farming practice peternakan;	Renstra Dinas	
2.	Meningkatkan nilai tambah produk hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha peternakan rakyat;	Peternakan Prov.Jatim	
3.	Meningkatkan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.	Tahun 2020-2024	
4.	Menyelaraskan dokumen perencanaan		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Misi ke - 2 :

Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Bupati Ngawi tersebut diatas tujuan dan sasaran pada Dinas Perikanan dan Peternakan dijabarkan pada table 3.2.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Nilai PDRB sub sektor perikanan
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	Nilai PDRB sub sektor peternakan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Ngawi pada umumnya serta Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Peternakan, Pendanaan pembangunan diarahkan dengan menggunakan tolok ukur kinerja sebagai dasar penetapan program dan kegiatan pembangunan. Setelah melalui tahapan identifikasi potensi, permasalahan, kerangka regulasi dan usulan partisipatif masyarakat.

Rencana kerja untuk mendukung program pembangunan Perikanan dan Peternakan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan didukung program-program meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Penyuluhan Pertanian.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 memuat 9 Program, 24 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan, total kebutuhan anggaran untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 15.087.707.513 selanjutnya total kebutuhan anggaran untuk prakiraan maju Tahun 2024 sebesar Rp. 12.900.518.779.

Pendanaan program-program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi yang dibiayai oleh APBD Kab, APBD Propinsi, dan APBN merupakan program prioritas Kabupaten Ngawi, dan juga sebagai aktifitas dalam mewujudkan standart pelayanan Minimal (SPM) dan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. maka disusun Usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagaimana dalam Tabel 4.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Page Indikatorif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatorif			
										Nasional					Daerah	
3																
3																
3	25															
3	25	01														
3	25	01	2.01													
3	25	01	2.01	01												
3	25	01	2.01	02												
3	25	01	2.01	03												
3	25	01	2.01	04												
3	25	01	2.01	05												

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Revisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Peningkat Jawa	
						Target 2023	Page Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator		
										Nasional					Daerah
3	25	01	2.01	07						Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum	Menguatkan Kondisi ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan		11 Laporan	16.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.01											5.019.048,334	
3	25	01	2.02	01						Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum	Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan teknologi dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi		26 Dokumen 1.128 Orang	5.019.048,334	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.02	05						Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Laporan	10.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.02	09						Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		50 Laporan	10.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.04											18.000,000	
3	25	01	2.04	02						Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Dokumen	18.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.01											96.279,000	
3	25	01	2.01											330.000,000	

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kesungguh Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	25	01	2.06	02	Pengadaan Pakan Onus berserta Atribut Kekengkapannya	Jumlah Paket Pakan Onus berserta Atribut Kekengkapan				1 Paket	17.075.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	1 Paket	20.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	25	01	2.05	08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	25.400.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	2 Orang	10.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4	25	01	2.05	10	Sosialisasi/Pertanian Perunding-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunding- Undangan				200 Orang	80.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	200 Orang	300.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunding-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunding- Undangan				3 Orang	40.000.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	3 Orang	0	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.05		Administrasi Umum Penangkal Daerah						336.229.364						253.842.400	
2	25	01	2.06	01	Pengadaan Komponen Kualitas UPTB/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi UPTB/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Paket	25.400.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
5	25	01	2.05	02	Penyediaan Perakatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perakatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				2 Paket	42.543.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	2 Paket	55.703.700	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Mecanik Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prairisan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prairisan Mulai Kerangka Tahun 2024		Pencapaian Daerah Peninggang Jawab								
						Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif									
										Nasional					Daerah							
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kawir	Jumlah Paket Bahan Logistik Carter yang Disediakan						1 Paket	7.885.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Paket	33.642.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	17.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Paket	12.500.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3	25	01	2.08	06	Penyediaan Bahan BAHAN dan Perawatan Perawatan Peralatan	Jumlah Dokumen Bahan Fisika dan Perawatan Perawatan/Undangan yang Disediakan						200 Dokumen	25.000.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Kerinci	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	200 Dokumen	10.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kerjasama Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Tamu						3 Laporan	11.500.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Kerinci	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Peningkatan produktivitas an daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	3 Laporan	0	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	01	2.05	09	Pengembangan Riset Konsultasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Riset Konsultasi dan Konsultasi SKPD						100 Laporan	348.738.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	100 Laporan	112.500.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang MELI Daerah Peninggang Urusan Pemerintah Daerah								86.828.000									
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						5 Unit	51.061.000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Ruralban	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Peningkatan produktivitas daerah melalui penggunaan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	5 Unit	15.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kwangku Pendidikan						Kategori Sesuai	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Didisalkan				4 Unit	44,827,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangpro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pemeliharaan mesin melalui pengalihan agribisnis dan agribisnis berbasis gerbang melalui pemanfaatan teknologi informasi	4 Unit	1,000,000	DINAS PERKAWAN DAN PETERNAKAN	
3.25.01.2.06	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah						342,138,817						342,138,817		
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	8,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemakmuran distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	300 Laporan	10,000,000	DINAS PERKAWAN DAN PETERNAKAN	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan/pelaporan melalui rekam dan elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisalkan Jumlah pemantauan daya listrik Jumlah penambahan daya listrik				5 kali 183 Laporan 0 TIK 0 KWH	207,698,817		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemakmuran distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	5 kali 183 Laporan 0 TIK 0 KWH	204,000,000	DINAS PERKAWAN DAN PETERNAKAN	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kantor yang Didisalkan				12 Laporan	19,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemakmuran distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	12 Laporan	32,000,000	DINAS PERKAWAN DAN PETERNAKAN	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Relayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Relayanan Umum Kantor yang Didisalkan				110 Laporan	105,084,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemakmuran distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	110 Laporan	100,000,000	DINAS PERKAWAN DAN PETERNAKAN	
3.24.01.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						245,410,000						24,000,000		

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Endogenik Sosial	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif		
										Nasional					Daerah
3.25.01.209.01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	20.000.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	1 Unit		0	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN
3.25.01.209.02	Pemeliharaan Asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perbaikannya				4 Unit	40.000.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	4 Unit		0	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN
3.25.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				20 Unit	40.000.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	20 Unit		0	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN
3.25.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	80.750.000	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	4 Unit		0	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN
3.25.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bendungan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bendungan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktivitas daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	1 Unit	20.000.000	0	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSEKUTUAN TANGKAP	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5%		5%	5%	292.028.000					5%	122.960.000		
3.25.03.2.11	Pengelolaan Perairan (Bau di Wilayah Sungai), Gersa, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dinafakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						129.500.000						102.960.000		

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Page Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 25 03 201 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan laut, dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	29,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Dokumen	12,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
1 25 03 201 02	Penyediaan Fasilitas Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Fasilitas Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	2 Unit	95,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
1 25 03 201 03	Bejambuan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Bejamban dan Tersedia				3 Unit	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perikanan daerah melalui pengkatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	3 Unit		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
1 25 03 202	Pemerkayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						72,508,000						26,000,000		
1 25 03 202 01	Pengembangan Keselamatan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Mengikuti Kapabilitas				40 Orang	50,000,000		FUNDASI ANGLISIA (FAS)		Pemeliharaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	60 Orang		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
1 25 03 202 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Ketersediaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Didukung Pembiayaan dan Pengembangan Ketersediaannya				5 Kelompok	20,508,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	5 Kelompok	20,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
1 25 04	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%		%	5 %	1,706,959,668					5 %	1,162,000,000		
1 25 04 202	Pembudayaan Perikanan Bina Nelayan Kecil						148,500,000						88,000,000		

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Misi/Kidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		Pangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Ragu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Ragu Indikator						
										Nasional	Daerah									
1	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas							20 Kelompok	270.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Kelompok	80.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pemberian dan Pengembangan Kerjasama Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama							5 Kelompok	75.500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kelompok		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	04	2.01		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									1.340.496,668					1.340.496,668	
1	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							2 Dokumen	30.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	30.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							7 Unit	815.496,668	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Unit	850.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	04	2.04	03	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5 Unit	600.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	132.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan (dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil dan Evaluasi Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan							1 Dokumen	65.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	40.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	40 Orang	30,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kawasan Perairan Umum Darat (PUID) yang diawasi	%		%	15 %	20,000,000					15 %	20,000,000		
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						20,000,000						20,000,000		
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%		%	6 %	340,000,000					6 %	290,000,000		
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						10,000,000						10,000,000		
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						25,000,000						15,000,000		

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Target Akhir Terdapat RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sarana	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Penyngkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 06 2.02 01	pelaksanaan Rancangan dan Perencanaan Penyediaan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemastan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah UHT Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pekikan yang Mendapatkan Pemasaran Terhadap Pemerapan Perijinan Pemasaran Berasiala pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pekikan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				4 Unit Usaha	25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur perikanan guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas perikanan	4 Unit Usaha	25.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						315.000.000						265.000.000		
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersefikan Ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40 Ton	190.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur perikanan guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas perikanan	40 Ton	95.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Petaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				1 Petaku Usaha	110.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur perikanan guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas perikanan	1 Petaku Usaha	120.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.073.340.000						3.144.940.000		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN SARANA PERTANIAN	Pertentode peningkatan produktivitas ditembak Pencapaian pemerataan rejalasi dan jumlah seksi proyekti hwan manula	% %		% %	1 % 90 %	4.012.340.000					1 % 90 %	2.592.140.000		
3 27 02 1.01	Penguatan Penguasaan Sarana Pertanian						400.000.000						400.000.000		
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Penguasaan Sarana Penguasaan Pemerataan Sesuai dengan Kapasitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokal	Jumlah Penguasaan Penguasaan Sarana Penguasaan Pertanian Sesuai dengan Kapasitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokal				01 Laporan	400.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur perikanan guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas perikanan	01 Laporan	400.000.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						2.760.000,000						1.295.000,000		
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2.100.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	2 Dokumen	635.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	660.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Dokumen	660.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						595.140,000						595.140,000		
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				20 Laporan	565.140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	20 Laporan	565.140,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				4 Laporan	30.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	4 Laporan	30.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecut						302.000,000						302.000,000		
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	302.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	1 Laporan	302.000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelayanan pemotongan hewan di RPH Persentase peningkatan produksi peternakan	% %		% %	100 % 1 %	250,000,000					100 % 1 %	250,000,000		
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						180,000,000						180,000,000		
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengasas- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Unit	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengasas- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Unit	80,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						70,000,000						70,000,000		
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Laporan	70,000,000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kematian ternak karena penyakit	%		%	<2 %	2,052,800,000					<2 %	2,052,800,000		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						850,000,000						850,000,000		

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Kode	Divisi/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Rangkai Pendanaan					Kelompok Sarana	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023		Pemerintah Daerah Panggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Zoonosis				19 Laporan	850.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAE Non-Fiskal-Dana Kotaharian Pangan dan Pertanian	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		19 Laporan	850.000.000	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						922.000.000						922.000.000		
5 27 04 2.03 01	Pengadaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				84% Laporan	922.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		84% Laporan	922.000.000	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN	
6 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Partisipasi Tingkat Kesehatan Masyarakat Veteriner						280.000.000						280.000.000		
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				700 Laporan	200.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		700 Laporan	200.000.000	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PETERNAKAN	Persentase kelompok tani yang meningkat adanya keterampilan	%		%	1 %	250.000.000					1 %	250.000.000		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						250.000.000						250.000.000		
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kembali bagian Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kembali bagian Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Unit	250.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemertapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		10 Unit	250.000.000	DINAS PERKAMAN DAN PETERNAKAN	
						TOTAL	15.087.707.512						12.500.518.779		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman, sasaran dan tujuan dalam menyusun program dan kegiatan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan dan Perikanan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, selain sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Akhir kata Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

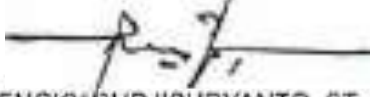
Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA

**VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
TAHUN 2023**

Pada hari ini Selasa 8 Maret 2022, bertempat di Ruang Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Awal Renja Dinas Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyempumaan pada Tahapan Perumusan Rancangan Renja dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 VERRY BARIA, S.ST 196702011989031004	Kabid Perekonomian  TOTOK SUGIHARTO, SE, MM 196712141003041004
 FARIDA SHOLAKATI, SE 197909042010012003	Sub koordinator  HENGKY PUDJISURYANTO, ST, M.Si 197902112006041004



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat 29 Juli 2022, bertempat di Ruang Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai Renja Perangkat Daerah.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
 VERRY BARIA, S.ST 196702011989031004	Kabid Perekonomian  TOTOK SUGIHARTO, SE, MM 196712142003041004
 FARIDA SHOLAKATI, SE 197909042010012003	Sub koordinator  HENGKY/PUDJISURYANTO, ST, M.Si 197902112006041004



INSPEKTORAT

Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kode Pos 63211 Telp. (0351) 74901.

Fax. (0351) 748179 Email : inspektorat@ngawikab.go.id

Website [http : www.inspektorat.ngawikab.go.id](http://www.inspektorat.ngawikab.go.id)

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023**

INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI	Disusun oleh/ Tanggal	UKA PIPIP S.S. 14 Juli 2022	✕
	Direviu oleh/ Tanggal	YENNI TYAS U. 14 Juli 2022	f
	Disetujui oleh/ Tanggal	SIGIT M. 14 Juli 2022	g

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 700/02.74.d/PWS/404.200/2022 tanggal 8 Juli 2022 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM :

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi berdasarkan Dokumen Rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar **Rp13.618.796.573,00** sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang belum tercukupi, yaitu Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renja Tahun 2023.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, kelengkapan dokumen pendukung rencana kerja tidak lengkap.



INSPEKTORAT

Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kode Pos 63211 Telp. (0351) 74901.
Fax. (0351) 748179 Email : inspektorat@ngawikab.go.id
Website [http : www.inspektorat.ngawikab.go.id](http://www.inspektorat.ngawikab.go.id)

2. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dengan Renstra Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023

Berdasarkan pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan Renstra dan RKPD Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah sesuai dengan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.

3. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja

Berdasarkan pengujian atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sesuai ketentuan yaitu :

- SK Tim Penyusun belum dibuat ; dan
- Orientasi dan Agenda Kerja Tim belum dibuat.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengujian atas Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, diperoleh hasil bahwa untuk Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah sesuai.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

**5. Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang**

Berdasarkan pengujian atas Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang, diperoleh hasil bahwa untuk Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah selaras.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Program dan Kegiatan pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja telah selaras dengan usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang.

6. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

Berdasarkan pengujian atas Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya, diperoleh hasil bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil revidi, Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dapat menerima hasil Revidi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



INSPEKTORAT

Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kode Pos 63211 Telp. (0351) 74901.

Fax. (0351) 748179 Email : inspektorat@ngawikab.go.id

Website [http : www.inspektorat.ngawikab.go.id](http://www.inspektorat.ngawikab.go.id)

8. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi untuk memerintahkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar :

- Membuat Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renja;
- SK Tim Penyusun; dan
- Orientasi dan Agenda Kerja Tim.

An. Kepala Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Ngawi
Perencana Ahli Muda/
Sub Koordinator Perencanaan



G. VEREY BARIA, S.ST
NIP. 19570221 198903 1 004

Inspektur Pembantu Wilayah III
selaku Pengendali Mutu



DONI FORTANO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750119 200312 1 004

LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
: Ngawi
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 29 Juli 2022

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a	Pengertian	✓		
		b	Proses penyusunan Renja	✓		
		c	Keterkaitan renja dengan RKPD	✓		
		d	Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓		
		e	Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓		
1.2	Landasan Hukum		Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓		
1.3	Maksud dan Tujuan		Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓		
1.4	Sistematika Penulisan		Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓		
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a	Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓		
		b	Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS AMBIL DARI APLIKASI SMEP)	✓		
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓		
		b	Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a	Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓		
		b	Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓		
		c	Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓		
		d	Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓		
		e	Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓		
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a	Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓		
		b	Alasan proses review dilakukan	✓		
		c	Temuan setelah proses review	✓		
		d	Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a	Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓		
		b	Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓		
		c	Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 89 Tahun 2017	✓		

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
	Menjelaskan mengenai :	a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓			
		b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓			
		c Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓			
		d Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS CETAK DARI APLIKASI SIPD)	✓			
V PENUTUP						
	Berisikan uraian penutup :	a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			
		b Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓			
		c Rencana tindak lanjut	✓			
		d Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
VI	LAMPIRAN					
	Pemetaan Program/Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan HARUS CETAK DARI SIPD	✓			
		b Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Rancangan Renstra 2021-2026	✓			
		c Indikator Program/Kegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Rancangan Renstra 2021-2026	✓			
		d Indikator Sub Kegiatan telah mengakomodir hasil Pemutakhiran berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	✓			

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Totole Sugiharto	
2.	Heryky P.	

LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

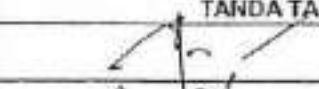
: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
: Ngawi
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 20 Mei 2022

BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
		Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
PENDAHULUAN					
Latar Belakang		✓			
Menjelaskan mengenai :	a	Pengertian	✓		
	b	Proses penyusunan Renja	✓		
	c	Keterkaitan renja dengan RKPD	✓		
	d	Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓		
	e	Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓		
Landasan Hukum		Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah.	✓		
Maksud dan Tujuan		Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓		
Sistematika Penulisan		Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓		
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a	Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓		
	b	Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (HARUS AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2021)	✓		
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓		
	b	Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		✓		
Menjelaskan mengenai :	a	Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓		
	b	Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓		

BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
		Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
	c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			
	d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			
	e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
	b Alasan proses review dilakukan	✓			
	c Temuan setelah proses review	✓			
	d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓			
	b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
	c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
Menjelaskan mengenai :	a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓			
	b Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓			

BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
		Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
	c Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓			
	d Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
PENUTUP					
Berisikan uraian penutup :	a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			
	b Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓			
	c Rencana tindak lanjut	✓			
	d Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓			
LAMPIRAN					
Pemetaan Program/Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan HARUS SESUAI DENGAN RPJMD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	✓			
	b Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Rancangan Renstra 2021-2026	✓			
	c Indikator Program/Kegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Rancangan Renstra 2021-2026	✓			

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Totok Sugiharto	
2.	Heryly-P.	